

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial terlihat bahwa perbedaan alokasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan tipologi desa terdapat perbedaan yang signifikan dalam alokasi penggunaan Dana Desa untuk setiap desa yang ada di Kabupaten Boalemo. Sedangkan perbedaan alokasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan tipologi desa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam alokasi penggunaan Dana Desa di Kabupaten Boalemo.
2. Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo secara kualitas belum terealisasi secara maksimal, hal demikian terjadi karena Dana Desa yang seharusnya ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada public yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek namun kebanyakan dari beberapa item tersebut tidak terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari status desa yang hanya 16 Desa berstatus maju, 54 yang berstatus desa berkembang, 10 desa yang berstatus desa

tertinggal dan ada sebanyak 2 desa yang berstatus desa yang sangat tertinggal. Dengan dana yang nominalnya sangatlah besar yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa harusnya dapat membuat desa menjadi maju.

3. Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Boalemo lebih banyak di anggarkan untuk pembangunan fisik, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa relatif sedikit. Akibatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan di masyarakat itu kurang, karena anggarannya kurang. Sehingga ini yang membuat IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi) di Desa yang ada di Boalemo pada umumnya rendah dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

5.2 Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, beberapa saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagaiberikut:

1. Hendaknya pemerintah desa yang berada di masing-masing Desa di Kabupaten Boalemo lebih meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa terutama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan pada pembangunan yang ada di desa. Karena banyak pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Perlu adanya perbaikan pada pemanfaatan Dana Desa, dimana jangan hanya lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik tapi juga untuk pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa dan Masyarakat, bersinergi secara bersama-sama dalam menggunakan anggaran Dana Desa untuk keperluan/kepentingan yang dibutuhkan oleh Desa yang ada di Kabupaten Boalemo.
4. Perlu adanya pemaparan kepada masyarakat ataupun evaluasi bersama, untuk penggunaan anggaran Dana Desa yang ada di Kabupaten Boalemo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, Muhammad Amir, and Bobby Rantow Payu. "Village Fund Transfer and Rural Poverty in Indonesia". *Economics Development Analysis Journal* 8, no. 4 (2019) hal. 324-334.
- ARHAM, M. A., & Rauf, HATU. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)*, 7(10), 433-442.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2015.
- Bintarto, R. 1985. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia, Indonesia.
- BPKP. 2015. *Membangun Good Governance Menuju Clean Government. Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519, 17 November 2016. www.bpkp.go.id*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015). *Kebijakan Dana Desa TA 2016*. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Dwi Febri Arifiyanto. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 2 No. 3 Hal. 28-30.
- Ferina., Burhanuddin., dan Herman Lubis. 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hilir)*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol.4 No. 3 Hal. 49-50.
- Husna, Saifatul dan Syukriy Abdullah. 2016. "Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 3 No.3 Hal. 282-293.
- Julita. 2018. *Tujuan dan Pemanfaatan Dana Desa*. Jakarta: Ghalia, Indonesia Hal. 45.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017, Jakarta. www.kemenkeu.go.id

- Mosii, Sjafrudin. 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*. Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Nuryaman & Christina, Veronica 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan OTK Kantor Pembantu Bupati/Walikota/madya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Hanya di Fokuskan Untuk Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*. Jakarta.
- Rifhi Siddiq, *Antropologi Sosial*, Jakarta: Pustaka Setia, 2006.
- Riska, A., Ade, S., & Ak, M. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Setyaningsih, Irma. 2015. Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Jurnal Untan*.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama Hal. 25.
- Sofiyanto., Moh, Ronny Malavia Mardani., & M. Agus Salim. 2017. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates*

Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen Volume. 6 No. 4 Hal. 37-40.*

Subroto, Agus, 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. (Tesis yang Dipublikasikan, Universitas Diponegoro Semarang, 2009).

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 *tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tanggal 4 Oktober 1999 *tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo* (LN. RI Tahun 1999 Nomor 178. Tambahan Lembaga Negara RI No. 3899).